

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas politik demokrasi penuh dengan ketidakpastian. Pernyataan ini berangkat dari kenyataan bahwa peran demokrasi selama ini terimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti kebebasan mendirikan partai politik, pelaksanaan pemilu dari pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden bahkan hingga pemilihan kepala daerah. Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi hanya menjadi mekanisme kompetitif dimana pemilihan pemimpin selalu terjadi melalui pemilu. Akibatnya, demokrasi hanya bertumpu pada pemilu semata, setelah dilakukan pemilu suara rakyat dikhianati sekan akan hanya dibutuhkan ketika momen tersebut saja (Pontoh, 2005). Padahal dalam kajian teoritis, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Subekti, 2015).

Perjalanan demokrasi di Indonesia pascareformasi 1998 menunjukkan transformasi besar mulai dari sistem otoritarian menuju sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Reformasi membawa perubahan mendasar seperti pemilu multipartai, desentralisasi politik, pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah, serta jaminan kebebasan sipil melalui kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilihan presiden mulai dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004. Hal ini menandai era baru legitimasi politik yang lebih demokratis, karena rakyat dapat menentukan pemimpin tertinggi tanpa perantara lembaga perwakilan. Namun demikian, meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami konsolidasi, berbagai persoalan masih mengemuka, seperti maraknya praktik politik uang, polarisasi politik, lemahnya akuntabilitas partai politik, serta dominasi politik identitas dalam kontestasi elektoral (Kemensetneg, 2024).

Sekalipun pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dan berfungsi sebagai pilar utama demokrasi prosedural, kualitas demokrasi substansial justru menunjukkan gejala kemunduran (Gusti, 2025). Dominasi elite politik, intensifikasi polarisasi sosial, serta terbatasnya ruang dialog publik mengindikasikan bahwa mekanisme elektoral belum memadai untuk menghasilkan proses politik yang inklusif dan reflektif.

Demokrasi prosedural yang berjalan di Indonesia memang menghasilkan rutinitas pemilu yang teratur, tetapi substansinya kerap melemah karena berbagai persoalan seperti yang disebutkan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, model demokrasi deliberatif muncul sebagai alternatif konseptual yang menawarkan paradigma baru dalam praktik politik terkhusus demokrasi. Demokrasi deliberatif merupakan salah satu pendekatan penting dalam teori demokrasi modern yang berakar pada pemikiran filsuf Jürgen Habermas. Dalam pemahaman demokrasi deliberatif, Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi setara antarwarga negara dalam membentuk kebijakan publik. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari frekuensi pemilu, melainkan juga dari kualitas deliberasi publik yang berlangsung secara rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi kekuasaan (Habermas, 1996).

Demokrasi deliberatif diartikan sebagai bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya dialog dan pertukaran argumen rasional di ruang publik (Muthhar, 2015). Dalam buku yang berjudul *Between Facts and Norms : Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Jürgen Habermas mengartikan demokrasi deliberatif merupakan pemahaman yang berakar pada *public sphere* dan *discourse ethics* yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam pengambilan keputusan politik (Habermas, 1996).

Bagi Habermas, keputusan politik yang sah tidak cukup hanya lahir dari pemilu atau voting, tetapi harus melalui proses diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak secara setara, inklusif, dan bebas dari dominasi (Habermas, 1996). Melalui proses deliberasi ini, warga negara dapat saling menguji ide, memberikan alasan, serta mencari titik temu sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama. Dengan kata lain, demokrasi deliberatif bukan

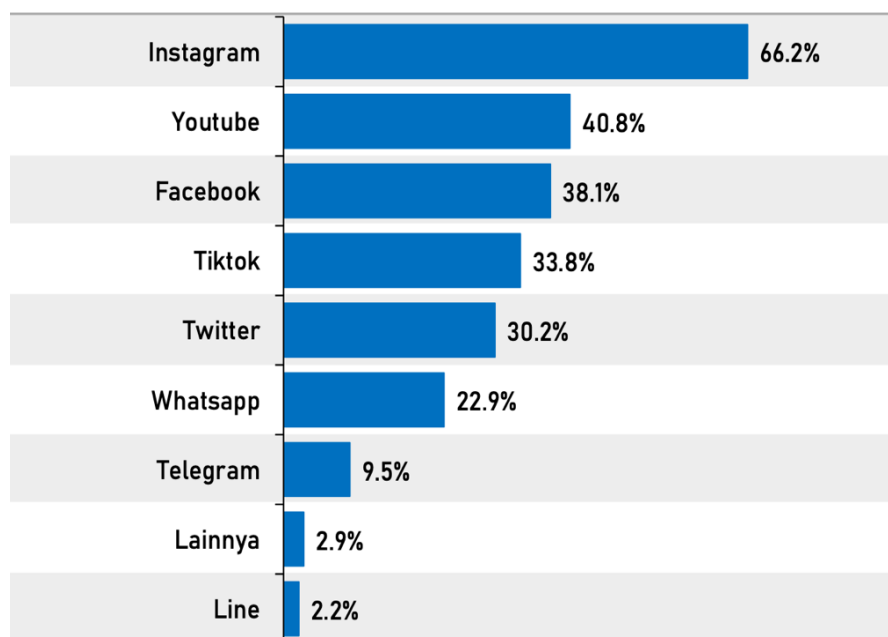
hanya soal menghitung suara terbanyak, tetapi soal bagaimana masyarakat membangun konsensus melalui komunikasi politik yang rasional dan partisipatif.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi dalam beberapa tahun belakangan ini telah terjadi perubahan besar dalam cara bagaimana cara masyarakat mengakses, menyebarkan, menerima dan memaknai suatu informasi. Media yang dulu hanya terbatas pada bentuk cetak untuk penyebarannya seperti surat kabar dan majalah kini telah berubah melalui media elektronik seperti radio dan televisi, hingga pada saat ini yang sudah memasuki era digital yang berbasis internet. Perubahan ini tidak hanya menyangkut bentuk dan saluran penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana fungsi media itu sendiri. media tidak lagi berperan pasif sebagai penyampai berita atau informasi, melainkan sudah menjadi aktor sosial yang berperan aktif dalam membentuk persepsi dan realitas sosial ditengah masyarakat (Laurencia, 2023).

Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan banyak perubahan terutama karena hadirnya media digital. Ruang deliberasi publik tidak lagi hanya terjadi secara tatap muka, tetapi juga berkembang dalam bentuk ruang publik virtual. Dalam konteks ini, media sosial kemudian menjadi arena baru yang memungkinkan praktik demokrasi deliberatif dijalankan melalui pertukaran gagasan, diskusi, dan interaksi antara kandidat politik dan masyarakat luas.

Dalam perkembangannya, Media digital kini tidak hanya digunakan untuk memperluas akses informasi, tetapi juga menghadirkan peluang partisipasi politik yang lebih terbuka bagi semua generasi terutama para pemilih pemula yang di dominasi oleh para gen Z (Dewi, DKK, 2024).

Penggunaan berbagai platform media sosial sebagai sarana guna mengakses informasi politik di Indonesia menunjukkan transformasi yang semakin kuat dalam 5 tahun terakhir. Hasil Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) pada Oktober 2023 menunjukkan bahwa 66,2% generasi muda memanfaatkan berbagai media sosial untuk mengakses informasi politik.



Gambar 1.1 Penggunaan Media Sosial untuk Informasi Politik
 Sumber: https://cdn1.katadata.co.id/media/files/2023/11/14/2023_11_14-09_29_57_b79a6291bf9dc96ed7cbd51505b9ca4d8.pdf

Grafik di atas menunjukkan tingkat penggunaan berbagai platform media sosial untuk mengakses informasi politik pada tahun 2023. Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center yang bertajuk “Politik di Mata Anak Muda : Persepsi dan Kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap Capres, Parpol dan Kampanye Pemilu 2024” memperlihatkan bahwa Instagram menjadi platform dominan, diikuti YouTube (40,8%), Facebook (38,1%), TikTok (33,8%), dan Twitter (30,2%). Angka ini mengindikasikan bahwa media sosial bukan hanya menjadi ruang interaksi sosial semata, melainkan juga sarana penting dalam membentuk opini publik dan preferensi politik anak muda (Kata Data Insight, 2023).

Temuan ini diperkuat oleh laporan dari YouGov pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa YouTube merupakan platform media sosial paling populer di Indonesia dengan tingkat penetrasi mencapai 81%, disusul Instagram dengan 74% (Naufal, 2023). Sejalan dengan itu, data GoodStats tahun 2024 mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber informasi terbesar, melampaui televisi (51%) dan situs berita daring (52%). Data ini menegaskan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat dominan dalam mempengaruhi ekosistem informasi politik masyarakat Indonesia.

Hal ini juga diperkuat dengan munculnya hasil survei yang dilakukan oleh LitBang Kompas yang dimuat dalam artikel “*Media Sosial Pengaruhi Pemilih pada Pemilu 2024*”. Survei ini memberikan bukti signifikan mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih. Survei tersebut menemukan bahwa 29,4% responden mengakses media sosial untuk melihat atau membaca konten pemilu beberapa kali dalam seminggu, dan sekitar 11% responden melakukannya setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya populer, tetapi juga telah menjadi sarana konsumsi informasi politik yang lebih rutin dan diandalkan masyarakat dibandingkan media daring konvensional (Sakti, 2023).

Tingginya penggunaan media sosial terkhusus Instagram dan YouTube memperlihatkan pergeseran pola konsumsi politik dari media tradisional ke platform visual dan interaktif. Instagram dengan fitur *reels*, *stories*, dan infografis politik memungkinkan penyebaran pesan yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Sementara itu, YouTube menjadi ruang bagi konten politik berdurasi lebih panjang, seperti debat, kampanye dialogis, atau konten naratif yang lebih substantif. Adapun TikTok yang mulai menunjukkan peningkatan algoritma dengan tren politik populer yang dikemas secara singkat dan menghibur, sehingga mampu menjangkau pemilih pemula secara lebih emosional.

Transformasi kampanye politik di Indonesia memperlihatkan pergeseran signifikan dari metode konvensional menuju ranah digital. Pada masa lalu, kampanye politik lebih banyak dilakukan melalui rapat umum, baliho, spanduk, iklan media cetak dan televisi, serta pertemuan tatap muka langsung. Model ini berorientasi pada mobilisasi massa dengan komunikasi satu arah, di mana kandidat atau partai politik dominan sebagai komunikator, sedangkan masyarakat cenderung pasif sebagai penerima pesan. Namun, perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin luas mengubah ekosistem kampanye secara drastis. Media sosial seperti *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, dan *Twitter* menjadi ruang baru yang lebih murah, cepat, serta mampu menjangkau khalayak luas, khususnya generasi muda yang sangat aktif di dunia digital (Putri K, 2024).

Transformasi komunikasi politik ini terlihat semakin nyata dalam pelaksanaan kampanye menuju Pemilu tahun 2024. Media sosial kini dijadikan sarana bagi para

politisi untuk membangun citra dan kedekatan dengan para pemilih (Khanif, Jamalulail 2024). Sementara itu, penelitian Fadillah dan Cahyono menegaskan bahwa dinamika politik kontemporer menuntut partai politik dan kandidat untuk melakukan inovasi komunikasi berbasis digital agar mampu menjangkau generasi milenial dan Z yang mendominasi daftar pemilih tetap (Fadillah, Cahyono 2023). Hal ini menandakan bahwa kampanye konvensional kini hanya berperan sebagai pelengkap, sedangkan kampanye digital telah menjadi arus utama dalam konteks demokrasi Indonesia.

Dalam konteks kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2024 lalu, inovasi digital terlihat semakin menonjol. Terbukti dengan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sama-sama memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama pelaksanaan kampanye (BBC News, 2024). Anies Baswedan menggunakan strategi dialogis melalui media sosial YouTube dan Instagram, Prabowo Subianto mengemas narasi populis melalui konten nasionalisme dan program unggulan di berbagai platform digital, sementara Ganjar Pranowo aktif memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk membangun kedekatan dengan pemilih muda. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang distribusi pesan politik, tetapi juga arena kontestasi ide, pencitraan, dan perebutan opini publik di ruang digital (Ramaniya DKK, 2024).

Salah satu inovasi menarik adalah munculnya fenomena kampanye dialogis yang digagas oleh pasangan calon Presiden Republik Indonesia Nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan bernama Desak Anies. Kampanye dialogis sendiri merupakan metode komunikasi politik yang menekankan interaksi dua arah antara kandidat dan publik. Berbeda dengan kampanye konvensional yang cenderung monologis, kampanye dengan model dialogis memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya, mengkritik, dan menguji gagasan kandidat secara langsung.

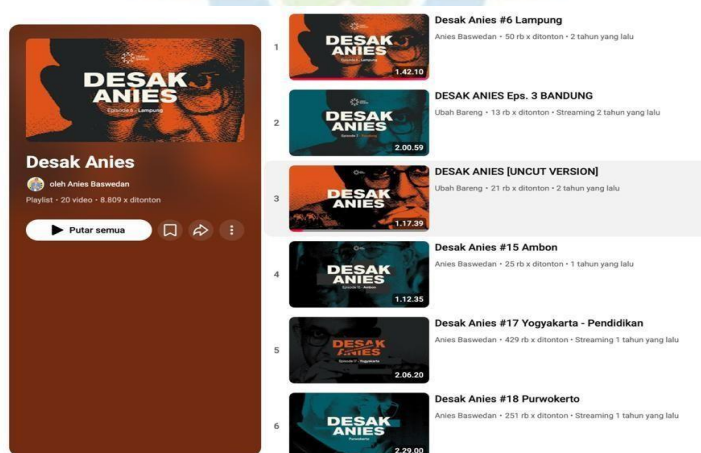
Program “Desak Anies” menjadi contoh nyata dari inovasi kampanye dialogis di era digital. Program ini dilaksanakan sebanyak 29 kali selama masa kampanye berlangsung, dimulai dari bulan Agustus tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.



Gambar 1.2 Dokumentasi Pelaksanaan Program Desak Anies

Sumber : <https://www.antarafoto.com/id/view/2137854/desak-anies-di-jakarta>

Program Desak Anies ini diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan masih banyak lagi dan kemudian setiap sesi diunggah secara penuh melalui kanal YouTube resmi Anies. Penyebaran melalui YouTube menjadikan program ini dapat diakses kapan saja (*on-demand*) oleh publik, sekaligus memperluas jangkauan audiens melampaui peserta yang hadir secara langsung di lokasi acara.



Gambar 1.3 Desak Anies di Channel YouTube Anies Baswedan

Sumber : <https://www.youtube.com/@aniesbaswedan>

Dalam program tersebut, publik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, memberikan kritik, dan menguji gagasan kandidat. Format tanya jawab terbuka ini sejalan dengan semangat demokrasi

deliberatif yang menekankan partisipasi setara, argumentasi rasional, dan ruang publik yang bebas dari dominasi.

Secara konseptual, *Desak Anies* dapat dipahami sebagai bentuk kampanye dialogis, yaitu model komunikasi politik dua arah yang memberi ruang interaktif antara kandidat dan masyarakat. Tidak seperti kampanye konvensional yang cenderung monologis, dalam *Desak Anies* publik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, hingga menguji gagasan kandidat secara terbuka. Model ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang dikemukakan Habermas, di mana diskursus publik menjadi arena penting untuk membangun legitimasi politik (Habermas, 1996).

Metode yang digunakan dalam *Desak Anies* berbasis format tanya jawab langsung dengan publik. Pertanyaan dapat diajukan secara terbuka oleh masyarakat, baik melalui media sosial maupun forum yang disediakan tim kampanye, kemudian dijawab langsung oleh Anies Baswedan. Hasil diskusi tersebut kemudian di unggah agar dapat disaksikan oleh semua segmen masyarakat. Format ini memanfaatkan kekuatan *new media* yang memungkinkan komunikasi interaktif, terukur, dan terdokumentasi. Program ini dikemas dengan gaya yang santai yang cocok dengan karakteristik serta gaya generasi muda (Basyari, 2023).

Jangkauan *Desak Anies* cukup signifikan, karena tidak hanya menjangkau pemilih dari kalangan muda yang dominan di media sosial, tetapi juga memperluas basis pemilih melalui diseminasi konten yang dapat diakses kapan saja (Gibraltar, 2024). Program ini memberi ruang bagi Masyarakat terutama generasi muda untuk dapat menyuarakan aspirasinya tanpa merasa digurui (Ramaniya DKK, 2024). Setiap episode program ini menghadirkan berbagai pembahasan yang spesifik dan cenderung mengusung tema-tema populis, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, ekonomi, lingkungan, hingga isu demokrasi, sehingga publik dapat melihat konsistensi dan kedalaman visi kandidat. Menurut Ramaniya, program ini berhasil membangun kesan partisipatif karena publik merasa memiliki ruang untuk “mendesak” kandidat secara terbuka. Dengan demikian, *Desak Anies* bukan sekadar ajang kampanye, tetapi juga arena pembelajaran politik bagi pemilih,

terutama generasi muda yang kritis terhadap isu kebangsaan (Ramaniya DKK, 2024).

Bobot yang dibahas dalam *Desak Anies* juga memperlihatkan upaya untuk menghadirkan kampanye yang lebih substantif dibandingkan sekadar pencitraan visual atau slogan politik. Misalnya, isu ketenagakerjaan dijelaskan dengan data dan rencana program, sementara isu lingkungan ditautkan dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kampanye dialogis dapat menjadi sarana untuk menguji kapasitas intelektual kandidat, bukan hanya karisma atau popularitas semata.

Meskipun kajian mengenai kampanye digital di Indonesia telah banyak dilakukan, mayoritas penelitian cenderung berfokus pada aspek strategi komunikasi, pencitraan kandidat, serta efektivitas media sosial dalam menjangkau pemilih. Kajian-kajian tersebut lebih menekankan bagaimana media digital berfungsi sebagai sarana distribusi informasi dan pembentukan opini publik, tetapi masih jarang yang menelaah secara serius mengenai dimensi deliberatif dari kampanye digital. Padahal, dalam konteks demokrasi deliberatif, yang terpenting bukan hanya soal bagaimana pesan politik disampaikan, tetapi bagaimana ruang publik virtual dapat menghadirkan diskusi yang rasional, inklusif, dan partisipatif.

Fenomena *Desak Anies* menjadi relevan untuk dikaji karena menghadirkan model kampanye dialogis yang jarang muncul dalam kontestasi politik nasional terkhusus di Indonesia, di mana publik diberi kesempatan untuk bertanya, mengkritisi, sekaligus menguji gagasan kandidat secara inklusif. Format kampanye seperti ini masih jarang muncul dalam kontestasi politik Indonesia yang umumnya bersifat monologis dan berorientasi pada pencitraan, sehingga *Desak Anies* menawarkan ruang diskursus yang berpotensi mendekati prinsip-prinsip demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan Habermas, yaitu partisipasi setara, rasionalitas argumentatif, dan proses pembentukan opini publik melalui dialog.

Urgensi penelitian semakin kuat karena kajian akademik mengenai kampanye digital di Indonesia masih didominasi oleh fokus pada strategi pencitraan, efektivitas media sosial, dan perilaku pemilih. Kesenjangan inilah yang

menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang signifikan untuk menghubungkan kampanye digital dengan teori demokrasi deliberatif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai apakah program *Desak Anies* benar-benar mampu menjadi praktik deliberasi politik yang berkualitas, atau justru sekadar simbol komunikasi politik yang dikemas dengan narasi partisipatif. Analisis semacam ini bukan hanya relevan secara akademik untuk memperkaya literatur tentang demokrasi digital dan demokrasi deliberatif di Indonesia, tetapi juga memiliki makna praktis yang besar.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai kampanye digital di Indonesia masih berfokus pada aspek komunikasi politik dan pencitraan kandidat. Masih jarang kajian yang mengaitkan praktik kampanye digital dengan dimensi deliberatif, terutama dalam konteks ruang publik virtual seperti *Desak Anies*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana kampanye dialogis *Desak Anies* merepresentasikan praktik demokrasi deliberatif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik kampanye dialogis yang diwujudkan dalam program “*Desak Anies*” di YouTube Anies Baswedan selama kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024?
2. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, seperti partisipasi setara, argumentasi rasional, dan keterbukaan ruang publik, diartikulasikan dan diwujudkan dalam program “*Desak Anies*”?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kampanye dialogis sebagai wujud demokrasi deliberatif melalui kajian terhadap fenomena “*Desak Anies*” di kanal YouTube pada kampanye Pemilihan presiden tahun 2024. Secara spesifik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara mendalam bentuk dan karakteristik kampanye dialogis yang diwujudkan dalam program “Desak Anies” di YouTube Anies Baswedan selama kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024.
2. Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip utama demokrasi deliberatif yakni partisipasi setara, rasionalitas argumentatif, dan keterbukaan ruang publik terwujud dalam praktik kampanye dialogis Desak Anies di platform YouTube.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademik maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian demokrasi deliberatif dan komunikasi politik digital. Dengan menganalisis fenomena *Desak Anies* sebagai bentuk kampanye dialogis, penelitian ini dapat memperkaya perspektif teoritis tentang bagaimana konsep deliberasi Habermas diaplikasikan dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memperluas literatur tentang transformasi kampanye politik di era digital, yang saat ini menjadi isu penting dalam studi politik dan media.

2. Kegunaan Praktis

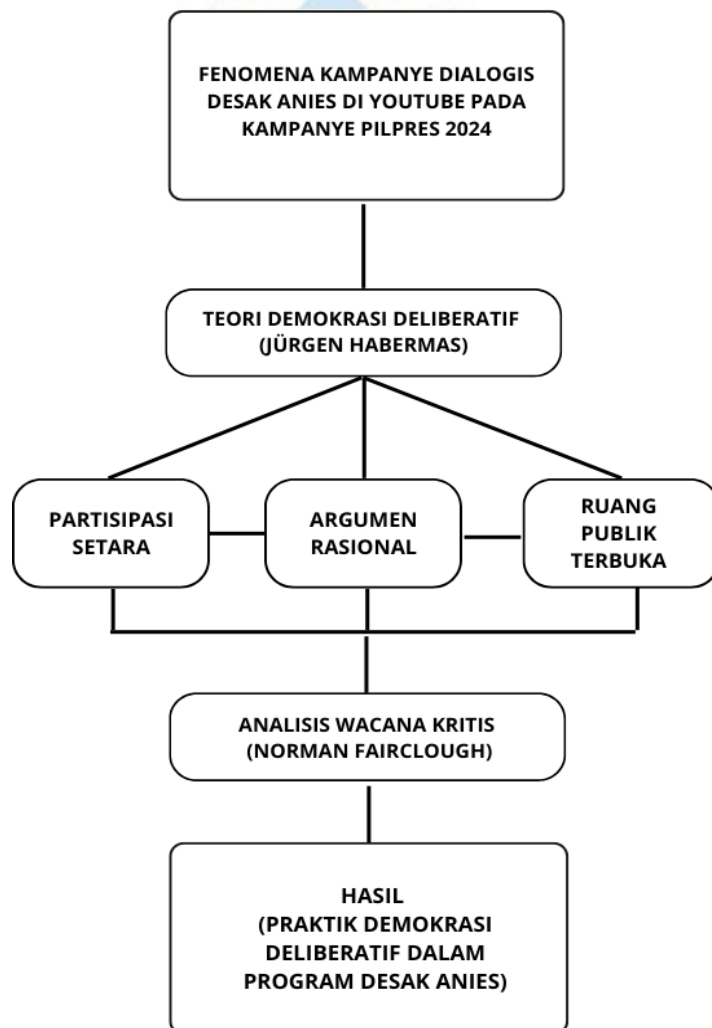
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aktor politik dalam memahami strategi kampanye yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan karakter pemilih muda di era digital. Bagi lembaga penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait kampanye digital agar lebih sehat, transparan, dan deliberatif. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis

mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam ruang diskursus politik digital, sehingga partisipasi warga tidak berhenti pada tahap elektoral, tetapi juga dalam proses deliberasi yang mendukung kualitas demokrasi terkhusus di Indonesia.



E. Kerangka Berpikir

Untuk memahami secara sistematis arah analisis dan alur logika penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka berpikir yang mampu menunjukkan hubungan konseptual antara fenomena yang dikaji, teori yang digunakan, hingga pendekatan analisis yang dipilih. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan konseptual yang menuntun proses penelitian dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan, sehingga setiap tahap analisis dapat dipahami sebagai bagian dari alur yang terstruktur dan saling berkaitan. Adapun kerangka berpikir penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 1.4 Kerangka Berpikir
Sumber : Peneliti

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena kampanye dialogis yang dilakukan oleh calon presiden republik Indonesia nomor urut 01 pada pemilihan presiden tahun 2024 yakni Anies Rasyid Baswedan bertajuk *Desak Anies*. Program ini menampilkan forum tanya jawab yang memungkinkan publik melemparkan pertanyaan secara langsung kepada kandidat, sehingga menciptakan bentuk komunikasi politik yang lebih interaktif dibandingkan model kampanye tradisional yang cenderung top-down dan berbasis orasi satu arah.

Pada praktiknya, Program ini tidak hanya memperlihatkan strategi komunikasi politik digital, tetapi juga membuka ruang diskursif yang memungkinkan publik berpartisipasi secara langsung melalui pertanyaan, kritik, dan dialog di ruang publik. Oleh sebab itu, *Desak Anies* dipandang sebagai fenomena empiris yang potensial merepresentasikan praktik demokrasi deliberatif di ruang publik digital.

Fenomena ini penting untuk ditelaah secara akademik karena merepresentasikan pergeseran praktik kampanye politik ke arah yang lebih partisipatoris dan berbasis dialog publik, sekaligus membuka pertanyaan kritis mengenai apakah ruang dialog tersebut benar-benar memfasilitasi praktik deliberasi yang substansial atau hanya berfungsi sebagai strategi komunikasi politik yang dikemas layaknya dialog. Dari titik inilah penelitian memerlukan kerangka berpikir yang terstruktur untuk menilai kualitas deliberasi yang berlangsung dalam program tersebut.

Sebagai dasar konseptual, penelitian ini merujuk pada teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas untuk memahami kualitas interaksi politik yang terkandung dalam fenomena desak anies. Demokrasi deliberatif menurut habermas menekankan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada sejauh mana proses politik didasarkan pada tindakan komunikatif (*communicative action*) yang bertujuan mencapai kesepakatan melalui pertukaran argumen yang rasional (Habermas, 1996). Habermas menekankan bahwa legitimasi politik sejati tidak cukup hanya didasarkan pada prosedur elektoral, melainkan

harus lahir dari proses diskursus publik yang rasional, inklusif, dan partisipatif (Habermas, 1996)

Dalam pandangan ini, hubungan antara masyarakat dan negara seharusnya dibangun melalui proses komunikasi yang terbuka dan reflektif, di mana legitimasi kebijakan politik tidak semata-mata didasarkan pada hasil pemungutan suara, tetapi pada kekuatan argumen yang muncul dari dialog publik. Demokrasi deliberatif menolak model politik yang elitis dan eksklusif, dan sebaliknya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk keputusan politik melalui proses deliberasi yang rasional dan inklusif.

Dalam perspektif Habermas, untuk mewujudkan praktik demokrasi deliberatif yang ideal, proses diskursus tersebut harus memenuhi tiga prinsip utama yang menjadi indikator penerapan demokrasi deliberatif yakni partisipasi setara, argumen rasional dan adanya ruang publik yang terbuka/inklusif (Habermas, 1996).

Prinsip Pertama yakni partisipasi setara, dimensi ini mengacu pada pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengemukakan argumen, pendapat serta aspirasi politiknya tanpa ada dominasi dari pihak tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kampanye *Desak Anies*, prinsip ini terwujud melalui interaksi publik yang terjadi secara langsung antara calon presiden dan masyarakat melalui kolom komentar, sesi tanya jawab, maupun tanggapan video yang tersebar luas di YouTube. Fenomena ini menciptakan potensi kesetaraan partisipatif, meskipun dalam praktiknya masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses digital, algoritma platform, dan struktur kekuasaan simbolik di dunia maya.

Prinsip kedua yakni argumen rasional, dimensi ini menjadi inti dari proses deliberasi publik. Habermas menegaskan bahwa komunikasi politik yang demokratis harus didasarkan pada pertukaran argumen yang logis, berbasis bukti, serta terbuka terhadap kritik dan revisi. Dalam kerangka ini, rasionalitas komunikasi menjadi ukuran utama apakah suatu diskursus benar-benar deliberatif atau sekadar retorik dan manipulatif. Kampanye dialogis *Desak Anies* menunjukkan upaya untuk menciptakan ruang dialog berbasis pertanyaan

kritis dan jawaban argumentatif, yang dapat mendorong pembentukan opini publik secara rasional. Namun, kualitas deliberasi ini tetap perlu diuji sejauh mana dialog yang berlangsung tidak terjebak pada retorika politik atau pencitraan semata, melainkan mampu mendorong pemahaman bersama dan pemecahan masalah secara substantif.

Prinsip ketiga yakni ruang publik terbuka, dimensi ini merupakan dimensi yang menekankan pada arena komunikasi yang dapat diakses secara bebas/inklusif oleh masyarakat untuk membahas isu-isu kepentingan kolektif tanpa tekanan atau kontrol dari kekuatan politik atau ekonomi yang hegemonik.

Ketiga prinsip tersebut yakni partisipasi setara, argumen rasional, dan ruang publik terbuka saling berkaitan dalam membentuk hasil praktik demokrasi deliberatif. Apabila ketiganya terintegrasi dengan baik dalam konteks kampanye politik digital seperti *Desak Anies*, maka proses tersebut dapat menghasilkan bentuk demokrasi yang lebih substansial, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada kekuatan argumentasi publik, keterbukaan terhadap kritik, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kehendak politik. Dalam hal ini, kampanye dialogis bukan hanya alat komunikasi politik, melainkan juga wadah pembelajaran demokrasi di mana warga negara dilatih untuk berpikir kritis, berdialog secara rasional, dan menilai argumentasi politik secara reflektif.

Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi deliberatif tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara bahasa, praktik diskursif, dan struktur sosial secara sekaligus (Fairclough, 1995). Fairclough memandang wacana sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa, ideologi, dan proses hegemoni.

Analisis Fairclough mencakup tiga dimensi analisis yakni dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosiokultural. AWK memungkinkan penelitian ini mengurai tidak hanya bagaimana bahasa digunakan dalam *Desak Anies*, tetapi juga bagaimana format, penyuntingan, pemilihan pertanyaan, serta dinamika penyampaian pesan mencerminkan atau mengaburkan praktik deliberatif.

Dimensi pertama adalah analisis teks, dimensi ini menyoroti struktur linguistik seperti retorika kandidat, pertanyaan publik, penggunaan metafora, atau strategi persuasi. Pada level teks, penelitian mengkaji bagaimana bahasa, diksi, dan argumen yang digunakan dalam *Desak Anies* membentuk representasi tertentu tentang kandidat, publik, dan isu politik. Dimensi kedua yakni Analisis praktik diskursif/wacana. Dimensi ini memeriksa proses produksi konten, termasuk bagaimana pertanyaan dikurasi, siapa yang diberi ruang berbicara, dan bagaimana audiens menafsirkan tayangan. Pada level praktik wacana, analisis diarahkan pada bagaimana interaksi antara kandidat dan publik diproduksi, didistribusikan, serta ditafsirkan melalui platform YouTube. Dan dimensi ketiga yakni analisis praktik sosiokultural, dimensi ini menempatkan *Desak Anies* dalam konteks politik dan media digital yang lebih luas, termasuk logika kampanye, budaya politik Indonesia, serta peran YouTube sebagai ruang publik baru (*new public sphere*) yang memiliki dinamika tersendiri.

Dengan mengintegrasikan kerangka teoritis Habermas dan pendekatan analitis Fairclough, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana praktik demokrasi deliberatif direalisasikan dalam program *Desak Anies*. Hasil analisis diharapkan mampu mengungkap sejauh mana program tersebut menyediakan ruang partisipasi yang setara, mendorong argumentasi yang rasional, dan benar-benar membuka ruang publik digital bagi masyarakat luas. Pada saat yang sama, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan deliberatif yang mungkin terjadi, seperti kurasi pertanyaan yang ketat, dominasi kandidat dalam mengarahkan jalannya dialog, atau kecenderungan konten untuk membangun citra politik ketimbang mendorong perdebatan substantif.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini bukan hanya menjelaskan alur logika penelitian, tetapi juga memosisikan penelitian dalam wacana akademik yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi dalam era kampanye digital dan transformasi ruang publik kontemporer.